

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dunia usaha. Menurut Baasir (2003) selama ini dunia usaha kita mencakup dunia usaha Swasta, BUMN dan Koperasi. Dunia usaha swasta sendiri terdiri atas pengusaha kecil (mikro), menengah dan besar. Masing-masing kelompok usaha tersebut memiliki peran yang sama dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan tidak merata serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan telah menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh. Rapuhnya fondasi perekonomian nasional telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi mulai pertengahan 1997 yang lalu, secara perlahan sektor pertanian dan industri kecil mulai mendapat perhatian yang lebih dari semua kalangan terutama oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga para ahli dan pengamat politik maupun ekonomi. Karena menurut Baasir (2003) sektor industri kecil mampu bertahan dengan segala permasalahan yang melanda bangsa Indonesia. Hal ini menimbulkan optimisme baru bahwa tanpa dukungan usaha kecil menengah, pembangunan akan selalu menghadapi kesulitan.

Sebagai wujud dari salah satu strategi pembangunan ekonomi Riau yang berbasis kerakyatan maka pemerintah Provinsi Riau menetapkan suatu kebijakan

ekonomi yang tertuang dalam Visi Riau 2020 yaitu berupa pilar pembangunan ekonomi kerakyatan.

Menurut Hidayat (2001) definisi pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada pendayagunaan kemampuan rakyat banyak (membangun perekonomian yang memiliki *local content*-nya tinggi) dimana pertumbuhan dan pemerataan ekonomi terwujud sekaligus.

Program PEK merupakan salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Riau yang telah berlangsung sejak tahun 2001 dan sampai sekarang masih berjalan. Dana Program PEK berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Riau yang disalurkan ke setiap kota/kabupaten kemudian di tingkat kota atau kabupaten dana PEK dikelola oleh suatu lembaga keuangan non bank yaitu Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR) yang pada akhirnya diberikan kepada para pengusaha kecil dan menengah. Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan pengusaha kecil melalui perkuatan struktur permodalannya sehingga dapat meningkatkan volume usaha dan memberikan nilai tambah dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya pengusaha kecil.

Usaha Kecil dan Menengah sebagai cerminan dari ekonomi yang berbasis kerakyatan merupakan usaha yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dan berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Keberadaan usaha kecil merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam

ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Kompas, 2001).

Sebagai kota metropolitan baru, Kota Pekanbaru memiliki potensi di sektor industri khususnya industri kecil (rumah tangga) sebagai basis dari pembangunan ekonomi masyarakat yang perlu terus dikembangkan. Perkembangan industri kecil dari segi jumlahnya cenderung mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Begitu juga dari jenis usahanya semakin beraneka ragam mulai dari usaha makanan, kerajinan, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan lain-lain.

Usaha kecil (industri rumah tangga) lebih dominan dan variatif jumlahnya bila dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya, dikarenakan usaha ini memiliki prospek yang cerah di Kota Pekanbaru. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekanbaru (2005) hal tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain pada umumnya produk usaha industri rumah tangga memiliki pangsa pasar yang lebih luas, ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja terampil yang memadai.

Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) memiliki peranan yang penting bagi pengembangan usaha kecil khususnya industri rumah tangga yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan adanya bantuan dana bergulir PEK pengusaha kecil diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan skala usahanya. Oleh karena itu perlu diketahui besarnya tingkat pendapatan dan skala usaha sebelum dan sesudah adanya PEK

1.2. Perumusan Masalah

Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) memberikan dampak terhadap pengembangan usaha kecil khususnya pengusaha kecil industri rumah tangga di Kota Pekanbaru Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PEK dan seberapa besar dampak adanya Program PEK terhadap tingkat pendapatan dan skala usaha.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1. Mengetahui pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK).
2. Mengetahui dampak Program PEK terhadap pengembangan usaha industri rumah tangga di Kota Pekanbaru dalam hal tingkat pendapatan usaha sesudah dan sebelum adanya Program PEK.
3. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil dalam pengembangan usahanya berkaitan dengan adanya bantuan PEK.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan, peranan PEK terhadap pengembangan usaha kecil jenis makanan di Kota Pekanbaru serta permasalahan apa saja yang terjadi dilapangan. sehingga bagi pihak Pemerintah dan para Stokholder dengan informasi tersebut akan dapat disusun pola pengembangan dan pemberdayaan ekonomi industri kecil yang lebih tepat. Bagi penulis sendiri berguna dalam penambahan wacana dan wawasan dalam bidang pertanian dan industri kecil yang ada di Kota Pekanbaru.